



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADAN WILDAN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**
3. NHK : **72088**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m²/120 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/70 m² di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/100 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **496.000.000**

1. MOBIL, BMW 728I SEDAN Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
7. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **212.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.470.775.681
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.163.775.681
III. HUTANG	Rp.	261.716.444
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.902.059.237

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.